

# KAJIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**RINI SUTRIKA SUOTH**  
**Drs. J. MANDEY, M.Si**  
**Drs. S. P. I. ROMPAS, M.Si**

**Abstract:** Accountability of government agency performance embodies an obligation to account for the success or failure of the implementation of policies, programs and activities to stakeholders or general public. In fact, performance accountability can not be optimally realized by many government agencies. From these studies were conducted to determine how government performance accountability at Touluaan district of Southeast Minahasa regency. Based on a literature review of the criteria used effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparency to look government performance accountability at Touluaan district

The research used a qualitative method. Key informants in this study were officers / employees of the sub-district 3 and 2 personnel section chief executive staff; and 2 village officials and 3 leaders / community leaders, so that the total number of informants there are 12 people. The research instrument was a researcher himself, while gathering data using interview techniques. Method analysis was performed with qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman.

The results of analysis indicate effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparency in the implementation of the program / activity generally show a fairly good quality. It was concluded that the government performance accountability Touluaan district seen from the aspect of effectiveness, efficiency, responsiveness, and transparency has shown a fairly good level of achievement. To improve the performance of government accountability Touluaan districts it is necessary to increase the number of employees, improving the quality of human resources personnel, increased budgetary allocations, and additional means of employment.

Keywords: performance accountability.

## **PENDAHULUAN**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara/pemerintah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara/publik yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu

menyediakan *public goods and public service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat (LAN, 2000).

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* (barang publik) dan pelayanan publik (*public services*) disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *good governance* atau pemerintahan yang baik. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik pemerintah dan masyarakat. Selain itu, *good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik

dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi (Sedarmayanti, 2003).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan penerapan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas suatu instansi/organisasi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi/organisasi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi/organisasi pemerintah yang bersangkutan (LAN, 2000).

Untuk mewujudkan akuntabilitas, ditetapkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan kemudian diikuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut produk hukum tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan UU tersebut pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan buku pedoman penyusunan

pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

Kinerja instansi-instansi pemerintah sekarang ini masih terus mendapat sorotan dari masyarakat. Masyarakat masih sering mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Fenomena demikian mengisyaratkan bahwa masyarakat belum merasa puas atas kinerja instansi-instansi pemerintah. Tuntutan tersebut harus direspons oleh instansi-instansi pemerintah, termasuk pemerintah kecamatan, untuk melakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dengan melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru telah terjadi perubahan yang mendasar menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu jika sebelum adanya kebijakan otonomi daerah yang baru kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, telah berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, kecamatan (camat) dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari

bupati/walikota. Dalam hal ini kecamatan (camat) mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut, kecamatan (camat) menyalenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan, yaitu koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan (UU. No.32 Tahun 2004; PP. No.19 Tahun 2008).

Kecamatan Touluaan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai

kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Tombatu dan disahkan pada 5 Oktober 2001. Kecamatan ini berpenduduk 17.610 jiwa (3.910 KK) yang tersebar di 17 Desa. Aparat pemerintah kecamatan (kantor camat) Touluaan hanya sebanyak 17 orang PNS dimana 8 orang diantaranya merupakan sekretaris desa yang ditempatkan pada kantor kepala desa, sehingga hanya ada 9 orang aparat/pegawai pada kantor camat.

Dari prasarvei yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kecamatan Touluaan di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, masih belum terwujud secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari masih adanya program dan kegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif dan belum memberikan hasil maksimal, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Program di bidang pemerintahan seperti peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, peningkatan kamtibmas, dan peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, belum semuanya dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Di bidang pembangunan, beberapa program seperti program pemberdayaan masyarakat, dan program peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga belum mencapai hasil optimal.

Belum maksimalnya kinerja pemerintah kecamatan Touluaan seperti yang ditunjukkan oleh beberapa indikasi tersebut di atas, dapat menunjukkan belum dilaksanakannya dengan efektif sistem akuntabilitas kinerja. Namun sejauh mana kebenaran indikasi persmasalahan tersebut tentu masih perlu dikaji berdasarkan data penelitian. Tertarik untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tauluaan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena

atau peristiwa; atau menurut Schlegel (dalam Sugiono, 2002), penelitian deskripsi adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Penelitian deskriptif-kualitatif menurut Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong (2006) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan.

Penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis,

sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan atau melakukan pengujian hipotesis (Arikunto, 2002). Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian suatu hipotesis.

## **B. Fokus Penelitian dan Definisi Konsepsional**

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Tuoluaan Kabupaten Minahasa Tenggara yang secara konsepsional didefinisikan sebagai pertanggung jawaban tentang tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis pada setiap tahun. Berdasarkan kajian teoritis maka kriteria pengamatan terhadap tingkat akuntabilitas kinerja tersebut adalah efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan transparansi.

## **C. Sumber Data (Informan)**

Salah satu sifat dari penelitian deskriptif-kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sampel responden, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data (informan) dalam penelitian

ini ialah teknik *purposive* yaitu pengambilan sumber data/informan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu (Arikunto, 2000).

Adapun yang menjadi sumber data atau informan utama dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari : Camat (1 orang), Sekcam (1) orang, Kepala Seksi (3) orang, dan staf fungsional umum/pelaksana (2 orang). Selain itu, juga diambil informan dari unsur pemerintah desa (2 orang), dan unsur tokoh/pemuka masyarakat (3 orang). Dengan demikian, jumlah seluruh sumber data/informan akan ada sebanyak 12 orang.

#### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama (Moleong, 2006).

Atas pertimbangan inilah maka instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri (key instrument), sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara (*Interview*). Wawancara dilakukan terhadap para informan yang telah

ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya data penelitian, maka digunakan pedoman wawancara sebagai panduan.

Selain itu juga dilakukan studi dokumentasi guna mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Kantor Camat Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis

data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Reduksi data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah di kemukakan di atas bahwa dalam penelitian ini kajian tentang akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah kecamatan Touluaan dilihat dari tingkat keberhasilan di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik pemerintah kecamatan Touluaan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Kriteria penilaian akuntabilitas kinerja organisasi yang dipakai disini adalah efektivitas, efisiensi, transparansi, responsivitas.

Dalam rangka itu dilakukan penelitian dengan mewawancarai para informan yang sudah ditentukan yaitu unsur pejabat/pegawai pemerintah

kecamatan Touluaan, dan unsur masyarakat. Data yang terkumpul diolah, dianalisis dan disajikan secara kualitatif dalam bentuk naratif seperti berikut ini.

### 1. Efektivitas

Secara umum efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya; dengan kata lain tingkat tercapainya tujuan atau sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas (Barnard dalam Gibson dkk, 1998). Dengan demikian, konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output*; bahwa suatu kebijakan/program atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan/program atau kegiatan tersebut; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas adalah apakah kebijakan/program atau kegiatan menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan.

Dalam konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator efektivitas adalah untuk melihat apakah program dan kegiatan yang ditetapkan/dilaksanakan memberikan hasil yang diinginkan ?; atau dengan kata lain apakah hasil yang diinginkan dari suatu program/kegiatan dapat tercapai

(LAN, 2000). Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini maka pada penelitian ini tingkat efektivitas dilihat dari dua aspek yaitu : (1) apakah program/kegiatan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan Touluaan dalam rencana strategik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai yang direncanakan, (2) apakah target hasil yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan itu dapat dicapai.

Keseluruhan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan pemerintah kecamatan Touluaan yang ditetapkan dalam rencana strategis, baik yang berhubungan dengan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan tingkat capaian kinerja yang cukup baik. Walaupun ada program/kegiatan yang tidak mencapai hasil maksimal, namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah kecamatan Touluaan sudah cukup baik, dan tingkat capaian kinerja yang cukup baik. Ini sekaligus dapat

menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Touluaan sudah cukup baik dilihat dari segi efektivitas.

## 2. Efisiensi

Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah input yang digunakan telah menghasilkan hasil sebanding dengan output program atau kebijakannya. Suatu kebijakan, program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya/dana atau dengan waktu atau dengan tenaga yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk, 1998).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara hasil yang dicapai oleh suatu program/kegiatan dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut.

Dalam hal ini efisiensi dilihat dari : (1) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran/dana yang dipergunakan; dan (2) rasio atau perbandingan antara hasil program/kegiatan yang dicapai dengan sumberdaya manusia atau tenaga yang dipergunakan.

Pernyataan dari informan yang berhasil diwawancarai menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran/dana dan sumberdaya manusia pegawai sudah dilakukan dengan baik untuk memaksimalkan hasil capaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah kecamatan Touluaan baik untuk pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan di bidang pembangunan, dan pelayanan di bidang kemasyarakatan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Touluaan dilihat dari kriteria efisiensi nampaknya sudah baik.

### 3. Responsivitas

Dalam konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders*. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) ,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program yang sesuai atau tepat. Dari pengertian ini jelas bahwa responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya (Dwiyanto dkk, 2002). Organisasi pemerintah yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga (Osborne dan Plastrik, dalam Dwiyanto dkk, 2002).

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa tingkat responsivitas pemerintah kecamatan dalam penyusunan program/kegiatan yang

dituangkan/ditetapkan dalam rencana strategis sudah cukup baik sebagaimana tercermin dari tingkat keselarasan atau kesesuaian dari program/kegiatan yang ditetapkan dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hasil wawancara tersebut sekaligus dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dilihat dari kriteria responsivitas adalah sudah cukup baik.

#### 4. Transparansi

Dalam konsep *good governance*, transparansi mempunyai makna bahwa proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diperoleh atau diterima oleh mereka yang membutuhkan; dan bahwa informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dimonitor (Sedarmayanti, 2003). Menurut Dwiyanto dkk (2002) bahwa transparansi organisasi pemerintah merupakan isu yang penting bagi upaya ke arah perbaikan kinerja organisasi pemerintah. Transparansi dapat memberikan implikasi pada menurunnya tingkat korupsi di dalam organisasi pemerintah.

Transparansi pada organisasi atau instansi pemerintah merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka kepada masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintah kecamatan Touluaan sudah cukup baik. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Touluaan dan seorang pegawai pelaksana.

Hal-hal yang dikemukakan oleh para informan menunjukkan bahwa transparansi pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sudah cukup baik. Ini sekaligus menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Touluaan dilihat dari kriteria transparansi sudah cukup baik.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (pejabat/pegawai terkait dan masyarakat) sehubungan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Touluaan menunjukkan bahwa :

1. Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan umumnya sudah pada umumnya sudah menunjukkan tingkat capaian yang baik namun belum maksimal; artinya

bahwa program/kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan, namun belum semuanya mencapai hasil maksimal.

2. Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan umumnya sudah baik namun belum maksimal; artinya sumberdaya yang tersedia untuk pelaksanaan program/kegiatan terutama SDM dan sumberdaya finansial sudah digunakan dengan cukup baik.
3. Responsivitas dalam pelaksanaan program/kegiatan juga sudah menunjukkan kualitas yang baik namun belum maksimal; artinya bahwa program/kegiatan yang ditetapkan/dilaksanakan umumnya sudah sesuai atau selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
4. Transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan juga sudah menunjukkan kualitas yang baik namun belum maksimal; artinya bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan cukup transparan.

## **B. Saran**

Mendasari kepada hasil-hasil penemuan dalam penelitian ini maka

perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Touluaan perlu lebih ditingkatkan terutama pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan transparansi, sehingga dapat mencapai kualitas yang maksimal.
2. Agar pelaksanaan akuntabilitas kinerja dapat mencapai hasil maksimal, maka efektivitas, efisiensi, responsivitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas harus ditingkatkan. Untuk itu, perlu peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas, peningkatan alokasi anggaran, dan penambahan sarana dan prasarana kantor Camat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Budiman,R. 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung, Hakim Publishing.
- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Kencana.

Dwiyanto Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, UGM.

Keban, J.Y., 1995, *Analisis Peran dalam Penentuan Alternatif Kebijakan Publik*, Modul MAP-UGM.

LAN, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta, LAN dan BPKP.

Mahsum, M, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, BP-FE.

Moleong, L.J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Rafika Aditama.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung, Mandar Maju.

Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Rajawali Press.

Yousa, A, 2002, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Makalah, STPDN-Jatinogor Jawa Barat.

Dokumen :

TAP MPR-RI Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.